



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Tim Penulis

Deli Bunga Saravistha - Aden Sutiapermana - Hardi Fardiansyah

Andhika Djalu Sembada - Dwi Riyanti & Rianda Usmi - Daelami Ahmad

Sumario - Evi Susilawati - Siti Fathimah - Eva Pasaribu - Ricky Santoso Muharam

Fatkhul Muin - Vina Dini Pravita - Fitriani

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tim Penulis

Deli Bunga Saravistha - Aden Sutiapermana - Hardi Fardiansyah

Andhika Djalu Sembada - Dwi Riyanti & Rianda Usmi - Daelami Ahmad

Sumario - Evi Susilawati - Siti Fathimah - Eva Pasaribu - Ricky Santoso Muharam

Fatkul Muin - Vina Dini Pravita - Fitriani



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tim Penulis:

**Deli Bunga Saravistha, Aden Sutiapermana, Hardi Fardiansyah, Andhika Djalu Sembada,
Dwi Riyanti & Rianda Usmi, Daelami Ahmad, Sumario, Evi Susilawati, Siti Fathimah,
Eva Pasaribu, Ricky Santoso Muharam, Fatkhul Muin, Vina Dini Pravita, Fitriani.**

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-459-078-4

Cetakan Pertama:

Mei, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Pendidikan Kewarganegaraan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Mei, 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
A. Pendahuluan	2
B. Makna dan Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan	3
C. Patriotisme, Nasionalisme, Geopolitik dalam Pendidikan Kewarganegaraan	5
D. Meningkatkan Ketahanan Nasional Melalui Pendidikan Kewarganegaraan	9
E. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi Bagi Intra dan Antar Generasi	11
F. Rangkuman Materi	15
BAB 2 HAK ASASI MANUSIA	19
A. Pendahuluan	20
B. Diskursus Perkembangan Hak Asasi Manusia	21
C. Hak Asasi Manusia di Indonesia	25
D. Istilah dan Definisi Hak Asasi Manusia	27
E. Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia	28
F. Prinsip Hak Asasi Manusia	29
G. Macam-Macam HAM	31
H. Pelanggaran HAM	32
I. Landasan Hukum dan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia	33
J. Teori Hak Asasi Manusia	34
K. Rangkuman Materi	35
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	39
A. Latar Belakang	40
B. Hak Warga Negara	41
C. Kewajiban Warga Negara	45
D. Rangkuman Materi	49
BAB 4 KESADARAN BELA NEGARA	53
A. Pendahuluan	54
B. Pembahasan	58

C. Bela Negara Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia	59
D. Bela Negara dan Peran Media Sosial; Pencegahan Konflik dan Penanganan Potensi Konflik	61
E. Bela Negara Dalam Berbagai Cara	69
F. Rangkuman Materi	59
BAB 5 KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA	73
A. Pendahuluan	74
B. Sejarah Demokrasi	75
C. Pengertian Demokrasi	77
D. Prinsip-Prinsip Demokrasi	79
E. Nilai Demokrasi	82
F. Bentuk-Bentuk Demokrasi	83
G. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia	85
H. Rangkuman Materi	93
BAB 6 NEGARA DAN KONSTITUSI	99
A. Pendahuluan	100
B. Konstitusi	101
C. Negara	110
D. Rangkuman Materi	118
BAB 7 GEOPOLITIK DAN WAWASAN NUSANTARA	123
A. Pendahuluan	124
B. Definisi dan Kedudukan Wawasan Nusantara	125
C. Hakikat Wawasan Nusantara	128
D. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara	129
E. Konsep Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia	133
F. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia	135
G. Study Kasus (Potret Perbatasan Tinggal di Indonesia Menggantungkan Hidup dengan Indonesia)	140
H. Rangkuman Materi	142
BAB 8 KETAHANAN NASIONAL INDONESIA	145
A. Pendahuluan	146
B. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia	147
C. Landasan Hukum, Prinsip, dan Sifat Ketahanan Nasional Indonesia	149

D. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia	151
E. Ketahanan Nasional Indonesia dan Astragatra	151
F. Korelasi Antar Gatra	155
G. Ketahanan Nasional di Era Society 5.0	157
H. Rangkuman Materi	160
BAB 9 INTEGRASI NASIONAL	165
A. Pendahuluan	166
B. Pengertian Integrasi Nasional	167
C. Proses Terbentuknya Integrasi Nasional	169
D. Jenis-Jenis Integrasi Nasional	175
E. Urgensi dan Tantangan Integrasi Nasional Bagi Keberlangsungan Kesatuan Bangsa Indonesia	177
F. Rangkuman Materi	181
BAB 10 IDENTITAS NASIONAL	185
A. Pendahuluan	186
B. Pengertian dan Identitas Nasional	187
C. Faktor-Faktor Pendukung Penegakan Identitas Nasional	191
D. Upaya Peningkatan Pelaksanaan Identitas Nasional	192
E. Unsur-Unsur Pembentukan Identitas Nasional	196
F. Rangkuman Materi	198
BAB 11 POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL	203
A. Pendahuluan	204
B. Pengertian Politik	205
C. Sistem Politik	206
D. Struktur Politik	207
E. Komunikasi Politik	209
F. Budaya Politik	209
G. Strategi Nasional	211
H. Rangkuman Materi	212
BAB 12 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA	215
A. Pendahuluan	216
B. Sejarah Perkembangan Hukum Otonomi Daerah di Indonesia	219
C. Paradigma Pembagian Urusan Dalam Otonomi Daerah	221
D. Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	225
E. Rangkuman Materi	228

BAB 13 GOOD AND CLEAN GOVERNMENT	231
A. Pendahuluan.....	232
B. Prinsip-Prinsip Pokok Good & Clean Government	234
C. Good and Clean Government Sebagai Kontrol Sosial	239
D. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik.....	240
E. Manfaat Adanya Good and Clean Government	241
F. Hambatan Dalam Penerapan Good and Clean Government	243
G. Rangkuman Materi	245
BAB 14 IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER	249
A. Pendahuluan.....	250
B. Rincian Pembahasan Materi.....	251
C. Identitas Nasional.....	252
D. Hakikat Identitas Nasional.....	255
E. Faktor Pembentuk Identitas Nasional	256
F. Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional	258
G. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa	259
H. Kedudukan Identitas Nasional Sebagai Karakter Suatu Bangsa	262
I. Identitas Nasional di Indonesia	263
J. Pancasila Sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional Indonesia	267
K. Rangkuman Materi	268
GLOSARIUM	272
PROFIL PENULIS	282



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 11: POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos.

MKWU PPKn Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

BAB 11

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Pentingnya memahami politik dan strategi nasional dalam sistem ketatanegaraan akan memberikan gambaran terhadap apa itu politik, sistem politik serta politik strategi nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara politik menjadi salah satu hal kajian ilmu yang perlu dipelajari khususnya dalam mengambil suatu kebijakan, pemindahan kekuasaan, atau bagaimana cara untuk mempengaruhi orang lain untuk dapat mencapai tujuan.

Aristoteles pernah menjabarkan bahwa politik adalah *master of science*. Di mana ilmu tentang politik sebagai kunci untuk dapat mengenal serta memahami lingkungan (Surbakti,1992). Selain itu, Rafael Raga Maran mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk politik dimana keberadaannya dalam menjalankan kehidupan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat secara keseluruhan (Maran,2007). Tidak sedikit yang berpandangan bahwa politik selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan berpemerintahan. Sedangkan pengertian tentang ilmu politik dijabarkan oleh Ossip K. Flechteim dalam bukunya yang berjudul *Fundamental of Political Science*: ilmu politik merupakan ilmu sosial khusus yang mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi dan dapat mempengaruhi negara (Budiardjo,2016).

Miftah Toha menjelaskan bahwa cara berpikir serta bertindak seseorang akan membentuk cognitive maps. Cognitive maps ini merupakan peta kognisi suatu dasar terhadap struktur mental seseorang agar mau menerima dan mengartikualifikasikan tanda-tanda yang dapat membentuk kepercayaan diri sehingga mampu mengambil keputusan mau atau tidak mau melakukan tentang suatu hal (Toha,2003). Tentunya dengan orang yang memiliki cognitive maps di dalam dirinya akan dapat membuat keputusan-keputusan politik yang baik untuk dirinya. Dan inilah sebagai bentuk kemerdekaan politik untuk dirinya. Sedangkan jika seseorang tidak memiliki cognitive maps dalam dirinya artinya tidak memiliki kemerdekaan politik bagi dirinya sendiri (Toha,2003).

Dengan demikian ilmu politik sangat penting untuk dapat dipelajari terutama dalam mempelajari sistem ketatanegaraan, kelembagaan serta strategi nasional. Dengan memahami politik lebih dalam tentunya akan memberikan gambaran tentang sistem politik yang selalu dinamis dan dapat dipergunakan dalam menjalankan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. PENGERTIAN POLITIK

Penjabaran tentang politik jika dilihat dari Etimologis yakni “politik” berasal dari kata bahasa Yunani yaitu politea yakni “polis” (negara kota) yang memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Sedangkan “teia” (urusan). Jika diambil dalam Bahasa Indonesia politik memiliki arti kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik yang tentu saja terdiri dari suatu sistem yang terdiri dari asas, prinsip, keadaan, jalan, cara serta alat untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Carl Scmitt pernah mendefinisikan bahwa politik merupakan suatu alat untuk dapat membedakan antara kawan maupun lawan. Sedangkan pengertian politik dikemukakan oleh para ahli lainnya yakni Laswel dkk pada 1952 bahwa politik merupakan suatu proses dalam bentuk “siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana” (politics as who gets, what, when, and how). Sedangkan Easton (1981) merumuskan tentang pengertian politik sebagai pola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan, kehidupan publik, pemerintah dan konflik (Budiardjo, 2016).

C. SISTEM POLITIK

Sistem politik menurut David Easton adalah kesatuan (kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem politik masyarakat merupakan konsep induk sebab sistem politik hanya merupakan salah satu struktur yang membangun masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Selain itu sistem politik merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep). Dalam sistem politik memiliki variabel-variabel sebagai berikut:

1. Struktur adalah lembaga politik yang memiliki keabsahan untuk menjalankan sebuah fungsi sistem politik. Dalam konteks sebuah negara misalnya struktur politik terdiri dari input, proses dan output. Struktur input yang berfungsi sebagai pemasok komoditas dalam sistem politik, sistem proses memiliki tugas untuk dapat mengolah masukan dari struktur input. Sedangkan struktur output bertindak sebagai mekanisme pengeluarannya.
2. Nilai adalah komoditas utama yang distribusikan oleh struktur-struktur di setiap sistem politik yang wujudnya terdiri dari kekuasaan, pendidikan, kekayaan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran dan keadilan, kesegaran atau respek.
3. Norma adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak yang mengatur tat hubungan antar aktor dalam sistem politik.
4. Tujuan sistem politik, seperti dengan norma yang terdapat dalam konstitusi. Dalam tujuan sistem politik terdapat dalam pembukaan konstitusi suatu negara.
5. Input dan output adalah dua fungsi dalam sistem politik yang memiliki kaitan yang sangat erat. Apapun output suatu sistem politik akan dikembalikan pada struktur input. Struktur input akan bereaksi terhadap output yang dikeluarkan, jika positif akan memunculkan dukungan suatu sistem sedangkan jika negatif akan mendapatkan tuntutan atas sistem (Anggara,2013).

Tentunya setelah melihat variabel-variabel dari sistem politik tersebut tentunya perlu mengetahui dari ciri-ciri sistem politik tersebut. Easton menjelaskan terdapat beberapa ciri dari sistem politik. Ciri- ciri tersebut

adalah (1) unit-unit yang membentuk sistem itu dan luasnya batas-batas pengaruh sistem itu, (2) “input” dan “output” dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat (output) dan proses pembuatan keputusan (input) dalam sistem tersebut, (3) jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem tersebut dan (4) tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya (Mochtar Mas’oed & MacAndrews, 2000).

D. STRUKTUR POLITIK

Struktur politik terdiri dari dua kata yakni struktur dan politik. Struktur memiliki arti yakni badan atau organisasi sedangkan politik memiliki arti urusan negara. Secara estimologis, struktur politik memiliki arti badan ataupun organisasi yang berkaitan dengan urusan negara. Struktur politik menurut Sahya Anggara yaitu alokasi nilai-nilai yang bersifat otoratif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan (Anggara, 2013).

Struktur politik menurut Almond dan Powell Jr dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori yaitu; sistem, proses dan aspek-aspek kebijakan. Selain itu Almond dan Coleman membagi struktur politik terdiri dari infrastruktur yang terdiri dari struktur politik masyarakat, suasana kehidupan politik yang terdiri dari pemerintahan, suasana pemerintahan dan sektor politik pemerintahan.

Fungsi Suprastruktur dan infrastruktur:

1. Fungsi Suprastruktur

- a. *Rule Making* (membuat undang-undang). Fungsi ini dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang atau biasanya disebut dengan anggota/badan legislatif. Badan legislatif ini DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- b. *Rule Application* (melaksanakan undang-undang). Fungsi ini yakni pemerintah eksekutif harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh legislatif. Eksekutif terdiri pemerintah pusat termasuk jajaran kementerian sampai ke pemerintahan daerah.

- c. *Rule Adjudication* (mengadili pelaksanaan), lembaga yang memiliki fungsi ini yakni Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi.

2. Fungsi Infrastruktur

- a) Pendidikan politik
- b) Kepentingan
- c) Kelompok penekan
- d) Rekrutmen politik
- e) Komunikasi politik.

Dalam iklim demokratis tentunya suprastruktur terbagi ke dalam dua sifat yaitu; struktur formal dan struktur informal. Struktur formal ini dapat berupa mesin politik yang dapat mengidentifikasi berbagai masalah, menentukan serta memutuskan dan melaksanakan keputusan yang memiliki kekuatan yang mengikat masyarakat. Sedangkan struktur informal yakni sesuatu yang dapat mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan menerjemahkan, mengkonversikan tuntutan, dukungan dan masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. (Anggara,2013)

Struktur politik di Indonesia terdapat adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini terdiri dari Eksekutif (presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, camat, dan lurah/kepala desa), Legislatif (MPR.DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), Yudikatif (MK, MK dan KY). Pembagian kekuasaan ini biasanya disebut dengan trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755). Sedangkan adanya perbedaan pendapat tentang pembagian kekuasaan salah satunya dikemukakan oleh John Locke (1632-1704). Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif.

Konstitusi Indonesia tidak pernah secara jelas menyebutkan bahwa kekuasaan yang disusun ini merupakan ajaran trias politica. Namun, jika dicermati lebih jelas bahwa sangat terlihat pembagian kekuasaan di Indonesia mengadopsi ajaran dari Montesquieu dengan adanya checks and balances.

E. KOMUNIKASI POLITIK

Dalam mempelajari ilmu politik tentunya hal yang terpenting juga perlu memahami tentang komunikasi politik. Istilah tentang komunikasi ditandai dari karya buku *"The Politic of the Development Areas"* yang ditulis oleh Gabriel Almond pada tahun 1960. Gabriel Almond menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Selain itu definisi tentang komunikasi politik pernah dikemukakan oleh Michael Schudson pada tahun 1997 menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan penyampaian pesan yang memiliki atau setidaknya mempunyai efek pada persebaran atau penggunaan kekuatan di masyarakat atau perilaku yang mengarah pada kekuasaan itu (Hasan, 2016). Jadi komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan berbagai pesan politik dan para aktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah, Dalam komunikasi politik dapat dilihat dari dua arah;

1. Bagaimana institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan politik kepada publik.
2. Bagaimana infrastruktur politik menerima respon berbagai pesan politik terhadap suprastruktur.

Selain itu di dalam komunikasi politik terdapat berbagai unsur komunikasi politik yaitu; komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, penerima pesan politik, efek atau pengaruh (Pureklolon,2016).

F. BUDAYA POLITIK

Budaya politik merupakan perilaku individu serta memiliki orientasi terhadap kehidupan politik yang di hayati oleh para anggota suatu sistem politik, Roy Macridis menjelaskan bahwa budaya politik yaitu tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima oleh semua orang atau disepakati bersama. Sedangkan Samuel Beer menjelaskan bahwa budaya politik berkaitan dengan nilai keyakinan, sikap serta emosi tentang cara pemerintahan yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah (Anggara,2013).

Dari beberapa pengertian tentang budaya politik dapat dilihat tentang konsep budaya politik itu sendiri;

1. Konsep budaya politik lebih menekankan perilaku non aktual, orientasi, sikap, nilai dan kepercayaan.
2. Hal yang berkaitan dengan orientasi dalam budaya politik yaitu berkaitan dengan sistem politik yang artinya pembicaraan tentang sistem politik tidak terlepas dari sistem politik itu sendiri.
3. Budaya politik merupakan penjelasan secara konseptual yang menggambarkan komponen politik dalam tataran massif.
4. Konsep budaya politik terdiri dari nilai, sikap serta keyakinan yang berlaku di masyarakat serta kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Di dalam budaya politik memiliki beberapa komponen yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Selain itu Tipe-tipe budaya politik terdiri dari;

1. Berdasarkan sikap yang ditunjukkan yaitu militan dan toleransi.
2. Berdasarkan orientasi politiknya yaitu budaya politik parokial, budaya politik kaula, budaya politik partisipan dan budaya politik campuran.

Almond dan Verba menjelaskan di dalam budaya politik yang berkembang di masyarakat dihayati melalui kesadaran yang sesuai dengan orientasi yang terdiri dari;

1. Orientasi kognitif yaitu dimana masyarakat memiliki pengetahuan tentang sistem politik, peran dan berbagai kewajiban yang melekat pada dirinya. Kewajiban tersebut dibuat oleh pemerintah.
2. Orientasi afektif yaitu perasaan-perasaan masyarakat tentang sistem politik serta bagaimana peran masyarakat yang dapat menolak maupun menerima suatu kebijakan politik atau sistem politik.
3. Orientasi evaluatif yaitu keputusan masyarakat tentang objek politik yang berkaitan dengan nilai moral serta perasaan masyarakat itu sendiri. Kriteria ini biasanya berkaitan dengan informasi yang diterima.

G. STRATEGI NASIONAL

Strategi memiliki makna yang berasal dari bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai “the art of general” atau jika di dalam peperangan dapat diartikan seni seseorang panglima. Karl von Clausewitz (1780-1831) mendefinisikan bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan jika dilihat bahwa perang itu merupakan bagian dari kelanjutan politik (Jamaludin et al., 2017). Pada saat ini istilah tentang strategi tidak lagi hanya sebatas konsep semata, namun saat ini sudah dapat digunakan secara luas bukan hanya lagi digunakan di bidang politik namun sudah digunakan di beberapa bidang seperti ekonomi, sosial budaya, hankam maupun olahraga. Secara umum strategi memiliki makna bagaimana cara untuk mendapatkan kemenangan atau bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional untuk mencapai suatu sasaran serta tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional (Jamaludin et al., 2017).

Di Indonesia strategi nasional yang telah berlangsung lama disusun berdasarkan UUD 1945. Jika melihat bagaimana strategi nasional dalam menyusun politik serta strategi nasional di tingkat suprastruktur politik biasanya diatur oleh presiden/mandataris MPR. Dalam menjalankan tugas-tugas ini Presiden dibantu oleh para menteri yang dipilih sesuai dengan bidangnya serta hak prerogatif Presiden. Presiden memiliki peran penting untuk merancang berbagai program-program serta rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh para menteri yang telah ditunjuk. Program-program yang kongkrit inilah biasanya disebut dengan sasaran nasional. Adanya suatu proses politik serta strategi nasional pada tingkat infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Dimana peran negara harus melakukan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan berbagai sasaran sektoral.

Dengan adanya berbagai pranata politik serta adanya peran masyarakat dalam kehidupan politik berbangsa dan negara tentunya masyarakat memiliki peran besar dalam mengontrol berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan oleh para pejabat politik untuk mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang tentunya sudah ditetapkan oleh

MPR dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Presiden (Jamaludin et al., 2017) . untuk mencapai target program yang dibuat oleh Presiden dan para menteri tentu saja perlu ada langkah-langkah bagaimana suatu program tersebut dapat berjalan dengan baik. Tentu saja dalam merancang berbagai program baik negara maupun suatu organisasi perlu memiliki strategi. Strategi tersebut memiliki lima unsur untuk dapat terlaksana dengan baik, seperti; arena (pemasaran, penyaluran dan distribusi, kendaraan atau sarana, pembeda (*differebtiations*), rencana, pemikiran ekonomi (Assauri, 2018). Setelah strategi dirancang dan dibuat tentu saja perlu adanya keterlibatan dari masyarakat atau warga negara untuk dapat terlaksananya berbagai program. Adanya peran masyarakat atau biasanya sering disebut dengan masyarakat madani tentu saja akan selalu mengalami berbagai perkembangan. Perkembangan ini dikarenakan;

1. Adanya peran serta masyarakat diberbagai bidang yang semakin aktif dan terlibat langsung.
2. Masyarakat semakin terbuka akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
3. Masyarakat memiliki kemampuan dalam menentukan sikap serta menentukan pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Adanya pemahaman masyarakat semakin pintar dikarenakan tingkat pendidikan yang semakin tinggi.
5. Semakin terbuka dan kritis dalam mengontrol berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

H. RANGKUMAN MATERI

Dari materi yang telah disampaikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini;

1. Ilmu tentang politik sebagai kunci untuk dapat mengenal serta memahami lingkungan.
2. Politik yang tentu saja terdiri dari suatu sistem yang terdiri dari asas, prinsip, keadaan, jalan, cara serta alat untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.
3. Sistem politik memiliki beberapa ciri, yaitu a) unit-unit yang membentuk sistem itu dan luasnya batas-batas pengaruh sistem itu, b) “input” dan “output” dari sistem yang tercermin dalam keputusan-

keputusan yang dibuat (output) dan proses pembuatan keputusan (input) dalam sistem tersebut, c) jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem tersebut dan d) tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya.

4. Komunikasi politik terdiri dari dua arah yaitu; bagaimana institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan politik kepada publik dan Bagaimana infrastruktur politik menerima respon berbagai pesan politik terhadap suprastruktur.
5. Strategi tersebut memiliki lima unsur untuk dapat terlaksana dengan baik, seperti; arena (pemasaran, penyaluran dan distribusi, kendaraan atau sarana, pembeda (*differebtiations*), rencana, pemikiran ekonomi.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan politik!
2. Mengapa di dalam politik perlu adanya dukungan atau keterlibatan masyarakat!
3. Mengapa strategi nasional diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!
4. Jelaskan pengertian komunikasi menurut Gabirel Almond!
5. Jelaskan, mengapa komunikasi politik sangat diperlukan!

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (pp. 1–319). CV Pustaka Setia.
- Assauri, S. (2018). *Strategic Management*. PT Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, K. (2016). *Studi Komunikasi Politik*. Universitas Malikussaleh.
- Jamaludin, U., Damanhuri, Setiawan, D., & Raharjo. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Barat (BKS-PTN BARAT).
- Maran, R. R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. PT Rineka Cipta.
- Mochtar Mas'ood, & MacAndrews, C. (2000). *Perbandingan Sistem Politik*. UGM Press.
- Pureklolon, T. T. (2016). *Komunikasi Politik: Mempertahankan Integritas Akademisi Politikus dan Negarawan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Toha, M. (2003). *Birokarasi dan Politik* (PT RajaGra).

Eva Pasaribu, S.Pd., M.Pd



Penulis lahir di Pokan Baru 28 Agustus 1992, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Merupakan anak ke-2 dari 7 bersaudara. Menikah dengan Pdt. Henriko Sihotang, M.Th. Menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 091524 PNP Tonduhan (2004), SMP Negeri 1 Tanah Jawa (2007), SMA Negeri 1 Tanah Jawa (2010), Pendidikan Strata-1 ditempuh di Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Medan (2014). Pada tahun 2017 menyelesaikan Program Magister di Pascasarjana Prodi Pendidikan Dasar Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Medan. Saat ini menjadi Dosen tetap di Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar. Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sekolah dasar dan pendidikan kewarganegaraan. Diluar aktivitasnya mengajar penulis juga merupakan istri dari Pendeta dan sangat menikmati perannya menjadi ibu rumah tangga dan wanita karir.

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos.



Penulis kelahiran Bekasi 27 September 1986 semasa kecil tinggal di sebuah desa bernama Cibusah Kota. Masa Pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dihabiskan di Bekasi. Setamat SMA kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil prodi Pendidikan Kewarganegaraan (S1) kemudian melanjutkan program magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam. Semasa sekolah dan kuliah aktif di beberapa organisasi termasuk di LSM PKBI Yogyakarta, LSM Syarikat Indonesia dan terlibat sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan Kretek di Pilpres 2019 dan Pilkada 2020. Pernah Bekerja di beberapa sekolah seperti di SMP N 1 Cibusah, SMK N 1 Cibusah, SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Anyer, Homeschooling Primagama (HSPG) Yogyakarta, dan kini aktif mengajar di Homeschooling Entrepreneur (HSE) Yogyakarta, Tutor di Universitas Terbuka dan tercatat sebagai dosen tetap

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Munculnya pendidikan kewarganegaraan di latar belakang oleh semangat para pahlawan dan perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dan ketuhanan NKRI. Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai macam perubahan di dalam perkembangannya. Di mana perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperbaiki isi dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Pada mulanya istilah Pendidikan Kewiraan merupakan istilah yang digunakan sebelum memakai istilah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

PKN memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKN mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif dan kreatifitas. Sebagai suatu metode pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi cermin bagi warga negara sebagai bentuk jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Oleh karena itu, PKN harus di terapkan sejak di setiap jejang pendidikan sejak usia dini hingga pada perguruan tinggi demi menghasilkan penerus bangsa yang kompeten.